

ANALISIS SIKAP POLITIK MASYARAKAT PADA TIKTOK MELALUI KONTEN POLITIK DALAM CHALLENGE WELCOME TO INDONESIA 2021

Mila Dewanti
NPP. 29.0816

*Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Program Politik Indonesia Terapan*

Email: miladew28@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Currently, there is a decline in the Indonesian democracy index as a result of a series of efforts to limit expression from the government. This has resulted in people using other ways to express themselves, one of which is the social media TikTok. The ease of access and the uniqueness of TikTok's algorithm make this media a powerful medium for expressing oneself, especially in the political field, as was the case with the Challenge Welcome to Indonesia 2021 which was viral globally. **Purpose:** This study aims to find out how the political attitude of the community in the Welcome to Indonesia 2021 Challenge on TikTok and how the people's freedom of expression actually is on TikTok. **Methods:** The content analysis technique with attitude theory was carried out on 131 political content in the Challenge Welcome to Indonesia 2021 to analyze the political attitudes of the people on TikTok. Meanwhile, the interview technique using the theory of freedom of expression was conducted on five informants consisting of government elements and TikTok political influencers. **Results/Findings:** The final result of the study found that the majority of content creators were against the government with a percentage of 55%. This shows that the public is quite dissatisfied with the policies made by the government. In addition, people's freedom of expression on TikTok is quite high as long as it does not violate applicable rules or ethics. **Conclusion:** The attitude of the majority of people against the government and supported by the high level of community freedom raises several suggestions where in the future it is hoped that both the government and the community can increase public knowledge with digital literacy, not only that, efforts to guarantee the freedom of expression of the people on TikTok must also be based on the government's high commitment, especially in terms of clarity on the regulation of the ITE Law and prosecution of persons who abuse these regulations.

Keywords: Democracy, TikTok, Challenge, Political Attitude, Freedom of Expression

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dewasa ini, terjadi penurunan indeks demokrasi Indonesia sebagai imbas dari adanya serangkaian upaya pembatasan berekspresi dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan masyarakat menggunakan cara lain dalam mengekspresikan dirinya, salah satunya dengan media sosial TikTok. Kemudahan akses serta keunikan algoritma yang dimiliki TikTok membuat media ini menjadi salah satu media yang ampuh untuk mengekspresikan diri

khususnya di bidang politik seperti halnya pada Challenge Welcome to Indonesia 2021 yang sempat viral secara global. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap politik masyarakat pada Challenge Welcome to Indonesia 2021 di TikTok serta bagaimana sebenarnya kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok. **Metode:** Teknik content analysis dengan teori sikap dilakukan terhadap 131 konten politik Challenge Welcome to Indonesia 2021 untuk menganalisis sikap politik masyarakat di TikTok. Sementara teknik wawancara dengan teori kebebasan berekspresi dilakukan terhadap lima informan yang terdiri dari unsur pemerintah serta *influencer* politik TikTok. **Hasil/Temuan:** Hasil akhir penelitian didapatkan bahwa sikap masyarakat (*content creator*) mayoritas kontra kepada pemerintah dengan persentase 55%. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain itu, kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok tergolong cukup tinggi selama tidak menyalahi aturan atau etika yang berlaku. **Kesimpulan:** Sikap masyarakat yang mayoritas kontra terhadap pemerintah serta didukung kebebasan masyarakat yang tergolong tinggi memunculkan beberapa saran dimana ke depannya diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan literasi digital, tidak hanya itu, upaya penjaminan kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok juga harus didasari dengan komitmen tinggi pemerintah terutama dalam hal kejelasan regulasi UU ITE serta penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan regulasi tersebut.

Kata kunci: Demokrasi, TikTok, *Challenge*, Sikap Politik, Kebebasan Berekspresi

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Kebebasan dalam berekspresi merupakan salah satu syarat negara demokrasi sebagaimana diutarakan oleh Sulisworo, Wahyuningsih, dan Baehaqi dalam bukunya *Demokrasi* (2012:8). Wujud dari kebebasan berekspresi ini dapat dilihat pada bebasnya warga negara untuk menyampaikan aspirasinya berupa kritik, saran, atau pendapat kepada siapa saja termasuk pemerintah serta mengaktualisasikan diri dan sikapnya. Namun akhir-akhir ini banyak pihak yang beranggapan bahwa pemerintah mengabaikan kebebasan berekspresi masyarakat dan demokrasi secara umum. Hal ini dapat dibuktikan dalam laporan The Economist Intelligence Unit terkait Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2010-2020 dimana terjadi fluktuasi angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2010-2020. Pada tahun 2015 Indonesia meraih angka indeks tertinggi yaitu 7,03 namun berangsur menurun hingga sampai pada angka terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,3. Penurunan ini menjadikan Indonesia berada di peringkat ke 64 dunia, sebuah pencapaian terendah selama 14 tahun terakhir dan membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Filipina serta Timor Leste (Hasibuan, 2021:32). Salah satu aspek yang mempengaruhi kemerosotan ini adalah menyempitnya kebebasan sipil, sebagaimana penilaian Lokataru Foundation tahun 2020 dalam Hasibuan (2021:32) bahwa pada era Presiden Jokowi terjadi penyempitan ruang ekspresi masyarakat yang tampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan seperti pada penanganan isu Papua, tindakan intimidasi kepada para demonstran, kekerasan, pengerdilan kebebasan akademik hingga pemberangusan terhadap serikat buruh.

Kemerosotan demokrasi yang terjadi mengindikasikan kinerja pemerintah kurang optimal dalam menjamin demokrasi nasional khususnya kebebasan individu dalam berekspresi. Hal ini didukung dengan berbagai aksi pemerintah yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi

masyarakat sebagaimana diutarakan dalam media berita tempo dimana tercatat sejak bulan Januari hingga September 2021 terdapat sedikitnya 26 kasus pembatasan berekspresi. Pemerintah menjadi terkesan anti kritik dan tidak mau mendengarkan komentar negatif masyarakat. Padahal kritik sangat penting sebagai alat kontrol sosial dan pemerintahan. Selain itu, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara sehingga wajib dilindungi sebagai cerminan negara demokratis (Tilly, 2007:8).

Terjadinya penyempitan ruang berekspresi masyarakat membuat media berekspresi lain semakin digemari masyarakat seperti media sosial. Tidak hanya sebagai media bersosialisasi, namun juga kini media sosial telah menjadi media penyalur ekspresi dan sikap politik. Ekspresi politik didefinisikan oleh Yamamoto dkk. (2015:884) sebagai ekspresi pandangan politik melalui berbagi berita politik, memposting komentar politik, berbagi video dan gambar politik, dan bertukar pendapat politik. Melalui ekspresi politik ini sikap politik masyarakat dapat dinilai yang nantinya juga akan berimbas pada partisipasi politiknya (Zhu, Chan, dan Chou, 2019:450). Hal inilah yang dinamakan *politics of everyday life*, dimana politik tidak diambil melalui jalur institusi atau formal tetapi melalui jalur nonformal seperti media sosial dan apa yang dilakukan tetaplh merupakan pilihan politik. Fenomena ini didukung dengan fakta bahwa pengguna internet dan media sosial Indonesia yang sangat besar bahkan melebihi setengah dari total populasi penduduk. Besarnya pengguna internet serta pengguna aktif media sosial ini membuat beragam media sosial menjamur di tanah air, seperti : *YouTube, Instagram, WhatsApp*, hingga media sosial terbaru yaitu TikTok. TikTok dapat dikatakan merupakan aplikasi media sosial dengan perkembangan yang paling pesat. Semenjak kemunculan *platform* ini pertama kali pada bulan September 2016 terhitung pengguna aktif mencapai 732 juta pengguna pada Oktober 2020 di seluruh dunia.

Pertumbuhan yang pesat ini menjadikan media sosial TikTok menjadi media baru yang populer dan seolah menggeser posisi media sosial lain yang telah ada sebelumnya. Media sosial TikTok tidak hanya dimanfaatkan sebagai media kreatifitas dan promosi saja tetapi juga bisa digunakan sebagai media ekspresi politik. Hal ini senada dengan yang diutarakan Nuurrianti Jalli bahwa dengan popularitas TikTok yang menakjubkan menjadikannya sebagai wadah baru bagi generasi muda dalam menyuarakan aspirasi politik. Algoritmanya yang unik membuat konten politik yang disebar oleh pengguna dapat dilihat oleh pengguna di belahan dunia lain seperti Amerika dan Eropa melalui berbagai interaksi seperti likes, share, dan comment pada for you page (fyp). bentuk ekspresi politik di TikTok Indonesia yang sempat menjadi trending adalah challenge (tantangan) *welcome to Indonesia*. Challenge ini telah dilihat hingga 930,3 juta kali melalui *#welcometo* dan menjadi trending hastag pada bulan September 2021 di media sosial TikTok. Terlepas dari beragam tanggapan mengenai eufimisme yang muncul, konten ini viral dan berubah menjadi challenge (tantangan) yang diikuti hampir semua kalangan dengan bermacam bentuk baik kritik sosial hingga konten nasionalisme. Alhasil challenge ini telah menjadi sarana ekspresi politik yang beragam bagi masyarakat. Tidak hanya media dalam ekspresi politik, konten politik dalam challenge ini ternyata mampu menunjukkan preferensi serta sikap politik masyarakat melalui ekspresi politik yang diutarakan oleh *content creator* (pembuat konten) dari konten politik yang dibuat. Pentingnya mengetahui sikap politik sebagaimana dikemukakan oleh Cottam dalam Wijaya (2019:18) adalah untuk memahami bagaimana pandangan dan preferensi masyarakat serta asumsinya yang mampu menentukan perilaku politik. Dengan mengetahui sikap serta perilaku politik, pemerintah akan dapat memahami polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta mengetahui sejauh mana

sikap kritis masyarakat sehingga dapat dijadikan strategi komunikasi politik pemerintah sekaligus bahan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerjanya. Selain sikap politik, penilaian kebebasan berekspresi juga dapat dilakukan melalui media sosial TikTok ini. Dengan mengetahui respon dan opini masyarakat mengenai kebebasan berekspresi di media sosial dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan terhadap upaya pengembangan jaminan demokrasi tanah air.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Akhir-akhir ini banyak pihak yang beranggapan bahwa pemerintah mengabaikan kebebasan berekspresi masyarakat dan demokrasi secara umum. Hal ini dapat dibuktikan dalam laporan The Economist Intelligence Unit terkait Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2010-2020 dimana terjadi fluktuasi angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2010-2020. Pada tahun 2015 Indonesia meraih angka indeks tertinggi yaitu 7,03 namun berangsur menurun hingga sampai pada angka terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,3. Penurunan ini menjadikan Indonesia berada di peringkat ke 64 dunia, sebuah pencapaian terendah selama 14 tahun terakhir dan membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Filipina serta Timor Leste (Hasibuan, 2021:32). Salah satu aspek yang mempengaruhi kemerosotan ini adalah menyempitnya kebebasan sipil, sebagaimana penilaian Lokataru Foundation tahun 2020 dalam Hasibuan (2021:32) bahwa pada era Presiden Jokowi terjadi penyempitan ruang ekspresi masyarakat yang tampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan seperti pada penanganan isu Papua, tindakan intimidasi kepada para demonstran, kekerasan, pengerdilan kebebasan akademik hingga pemberangusan terhadap serikat buruh.

Kemerosotan demokrasi yang terjadi mengindikasikan kinerja pemerintah kurang optimal dalam menjamin demokrasi nasional khususnya kebebasan individu dalam berekspresi. Hal ini didukung dengan berbagai aksi pemerintah yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi masyarakat sebagaimana diutarakan dalam media berita tempo dimana tercatat sejak bulan Januari hingga September 2021 terdapat sedikitnya 26 kasus pembatasan berekspresi. Pemerintah menjadi terkesan anti kritik dan tidak mau mendengarkan komentar negatif masyarakat. Padahal kritik sangat penting sebagai alat kontrol sosial dan pemerintahan. Selain itu, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara sehingga wajib dilindungi sebagai cerminan negara demokratis (Tilly, 2007:8).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sikap politik serta kebebasan berekspresi di media sosial cukup jarang ditemukan, mayoritas meneliti *platform* seperti YouTube, Twitter, dan Instagram. Menariknya, penelitian terhadap media sosial TikTok yang tengah digemari belakangan ini justru belum pernah dilakukan sebelumnya. Kajian mengenai sikap politik telah dilakukan oleh Neng Sys Mafazah (2020), Malisa Ladini (2017), Meihong Zu dan Aihua Li (2019), Jennifer Hoewe dan Cynthia Peacock (2020), serta Rahmidevi Alfiani dkk. (2020). Mafazah (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Budaya Politik dan Elite Sikap Politik Pengurus PCNU Pandeglang Banten terhadap Pencalonan Ma'ruf Amin dalam Pilpres Tahun

2019 memberikan hasil bahwa ada tiga varian sikap pengurus PCNU Pandeglang, meliputi: sikap netral, mendukung dan tidak mendukung. Tindakan pemenangan dilakukan oleh pengurus dengan beragam cara seperti kampanye, sosialisasi lewat media sosial, pembuatan posko pemenangan, deklarasi serta melakukan pemilihan suara di TPS dan ada pula pengurus yang tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon demi menjaga netralitas organisasi. Sementara itu, Ladini (2017) dengan penelitiannya mengenai Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus memberikan hasil penelitian bahwa petani di kelurahan Pringapus yang aktif dalam kelompok tani mempunyai sikap politik yang lebih baik terhadap partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon serta calon bupati dan wakil bupati pada pilkada kabupaten semarang tahun 2015 daripada petani yang pasif atau tidak aktif dalam kelompok tani dimana mereka menunjukkan sikap politik yang negatif.

Penelitian lainnya oleh Zhu dan Li (2019) dalam *Political Attitudes of the Chinese Young People : An empirical study based on anti-corruption issue*, menampilkan hasil bahwa efek liputan media pada evaluasi pemuda China tergantung pada karakteristik individu mereka. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah untuk memperhatikan pemuda yang melakukan evaluasi rendah terhadap situasi anti korupsi dan mengambil strategi untuk menginspirasi antusias politik dan meningkatkan kepercayaan politik mereka. Tidak hanya itu, penelitian mengenai *The power of media in shaping political attitudes* oleh Hoewe & Peacock (2020) juga turut mewarnai kajian mengenai sikap politik, dimana menunjukkan bagaimana orang terlibat dengan media berita dapat mempengaruhi sikap politik mereka. Mengenai kebebasan berpendapat dan media sosial, Alfiani dkk. (2020) memberikan sumbangsuhnya dalam penelitiannya mengenai *Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia* dengan hasil yang menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berdemokrasi di media sosial adalah hoaks, perundungan, pro-kontra, penurunan norma dan etika, insekuritas yang tinggi, masalah belajar, serta budaya konsumtif Sehingga dari tantangan tersebut masyarakat menilai perlu adanya pembatasan sosial untuk mengatasi isu SARA serta tindak kejahatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (Penting jelaskan perbedaan Penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya)

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang tergolong baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan penulis menggabungkan kajian mengenai sikap politik dan kebebasan berekspresi pada media sosial yang masih minim dikaji yaitu TikTok. Terlebih lagi, penelitian ini dilakukan terhadap konten yang ada dalam *Challenge Welcome to Indonesia 2021*, challenge yang terbilang masih belum lama trending dan terjadi. Selain itu, teknik analisis data yang dilakukan berupa content analysis juga merupakan teknik yang tergolong baru dalam metodologi penelitian.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap politik masyarakat pada TikTok melalui konten politik dalam *Challenge Welcome to Indonesia 2021* serta bagaimana kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini ditujukan untuk melihat dan mengungkap suatu fenomena atau objek dalam konteksnya, menemukan arti atau

pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dihadapi, dimana berada dalam bentuk data kualitatif baik gambar, kata, maupun kejadian (Yusuf, 2017). Data yang ada dikumpulkan menggunakan dua cara yang berbeda, dalam hal analisis sikap politik di TikTok digunakan pengambilan data secara langsung pada aplikasi TikTok, sedangkan untuk menganalisis kebebasan berekspresi dilakukan teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Terdapat dua teknik analisis data yang dilakukan tergantung pada rumusan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis sikap politik masyarakat penulis menggunakan metode content analysis sedangkan dalam menganalisis kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok digunakan teknik reduksi data oleh Miles dan Huberman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis sikap politik masyarakat pada TikTok melalui Konten Politik pada *Challenge Welcome to Indonesia 2021* dengan menggunakan teori sikap (Azwar, 2013:24-28). Sehingga dapat diketahui bagaimana maksud dan makna dari konten politik yang diteliti. Terdapat tiga aspek yang dianalisis berdasarkan teori Sikap menurut Azwar (2013:24-28) yaitu (1) Kognitif, (2) Afektif, dan (3) Konatif. Sementara dalam mengetahui bagaimana kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok digunakan teori kebebasan berekspresi (La Rue, 2010).

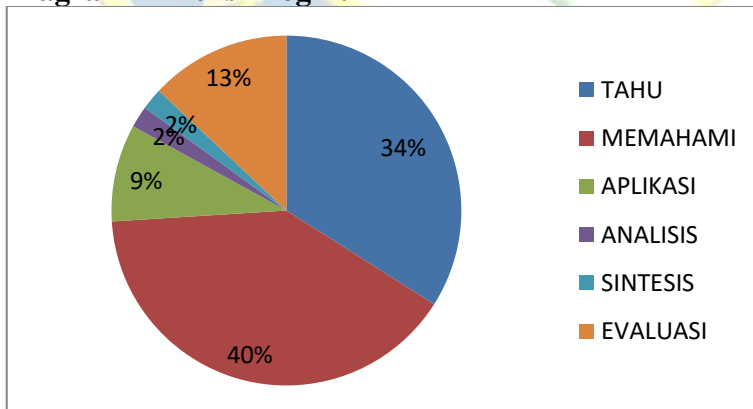
Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Analisis Sikap

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi 3 kolom sesuai dengan teori analisis sikap menurut Azwar (2013:24-28) yaitu kognitif, afektif dan konatif. Konten akan dianalisis baik dari segi pengetahuan (kognitif) yang terdiri dari 6 tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012:50-52), dari segi kecenderungan (afektif) yaitu dengan kecenderungannya terhadap pemerintah atau masyarakat apakah pro, netral atau kontra, serta segi sikap (konatif) yang dapat dilihat dari preferensi atau sikap yang dipilih apakah pro, netral atau kontra terhadap pemerintah.

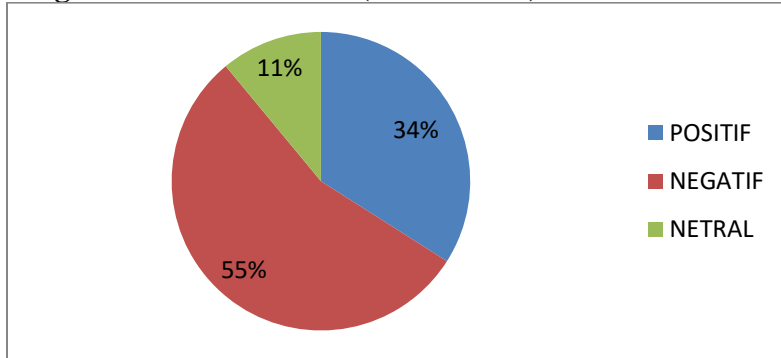
Diagram 1

Diagram Dimensi Kognitif



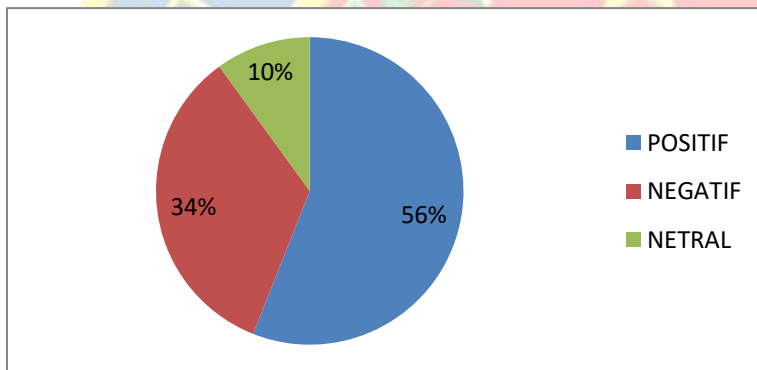
Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022

Diagram 2
Diagram Dimensi Afektif (Pemerintah)



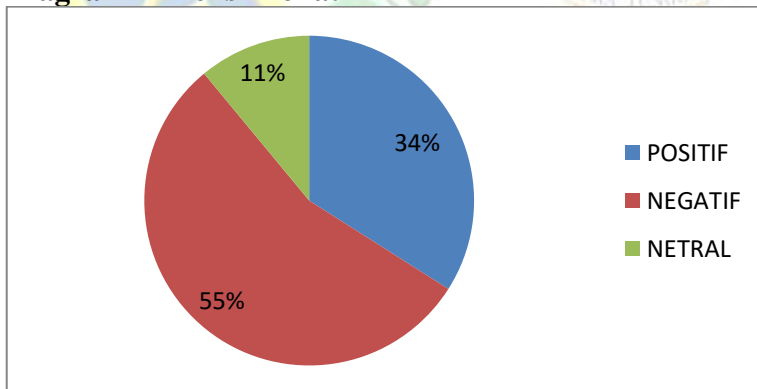
Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022

Diagram Dimensi Afektif (Masyarakat)



Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022

Diagram 3
Diagram Dimensi Konatif



Sumber: Hasil pengolahan data riset 2022

Pada **Diagram 1** Dari diagram diatas dapat dipahami bahwa tingkat kognitif atau pemahaman masyarakat (*content creator*) dalam membuat konten masih tergolong ke dalam level memahami sebesar 40%. Sebanyak 34% *content creator* juga berada pada level terendah yaitu tahu.

Sementara itu, *content creator* yang berada pada level evaluasi atau level kognitif tertinggi sebanyak 13%. Dari hasil persentase tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang diwakili *content creator* masih pada level kognitif yang cukup rendah yaitu memahami. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dapat menginterpretasikan secara tepat terhadap suatu objek atau isu politik. Tidak hanya itu, masyarakat juga telah paham dan mampu melakukan penarikan kesimpulan serta peramalan terhadap objek yang dipelajari.

Pada **Diagram 2** Dari hasil penelitian terhadap dimensi afektif didapatkan bahwa kecenderungan negatif terhadap pemerintah meraih persentase mayoritas sebesar 55%, netral sebesar 11% dan positif sebesar 34%. Berbeda dengan kecenderungan terhadap masyarakat, dimana persentase mayoritas adalah positif sebesar 56%, netral sebesar 10% dan negatif sebesar 34%. Dari diagram diatas dapat dipahami bahwa masyarakat (*content creator*) lebih mendukung masyarakat dibandingkan pemerintah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase positif masyarakat sebesar 56% dan persentase negatif pemerintah sebesar 55%. Sementara itu, hal tersebut juga dapat ditunjukkan dengan persentase positif pemerintah dan masyarakat yang sama-sama hanya sebesar 34%. Dukungan terhadap masyarakat ini terlihat dari banyaknya konten yang mengangkat dan membela hak-hak rakyat kecil atau masyarakat luas.

Pada **Diagram 3** Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap dimensi konatif, diperoleh bahwa sikap *content creator* kepada pemerintah mayoritas adalah kontra sebesar 55%, pro sebesar 34% dan netral sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang diwakili oleh *content creator* memiliki sikap yang kontra atau tidak mendukung pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya *content creator* yang mengangkat isu kritikan terhadap kebijakan atau kekecewaan terhadap suatu tokoh tertentu pada *Challenge Welcome to Indonesia*. Dimensi konatif memiliki hasil yang serupa dengan dimensi afektif kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan, kecenderungan *content creator* kepada pemerintah pasti akan selaras juga dengan sikap yang dia tunjukkan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dari grafik, dimana persentase dimensi afektif terhadap pemerintah sama dengan persentase dimensi konatif yaitu sebesar 55%.

Penulis menyimpulkan bahwa analisis terhadap sikap politik masyarakat mayoritas negatif kepada pemerintah. Mayoritas masyarakat yang kontra terhadap pemerintah mengindikasikan adanya ketidakpercayaan publik serta kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

3.2. Kebebasan Berekspresi Masyarakat

Penilaian mengenai kebebasan berekspresi masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep La Rue (2010:18) mengenai dua cara melihat kebebasan berekspresi. Selain itu, kebebasan berekspresi yang dimaksud dalam penelitian adalah kebebasan yang dimunculkan masyarakat melalui media sosial yaitu TikTok. Bentuk ekspresi yang dimunculkan meliputi komentar dan pengunggahan konten bermuatan ekspresi individu.

3.2.1. Kebebasan dalam Mencari, Mendapatkan, Menyebarkan Informasi dan Gagasan Melalui Media Apapun di TikTok

Dalam mengetahui bagaimana kebebasan masyarakat dalam mencari informasi dan gagasan di TikTok, penulis menggunakan teknik wawancara serta observasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua pihak yaitu pemerintah dan *influencer* politik, didapatkan hasil bahwa masyarakat termasuk bebas dalam mencari informasi di TikTok. Hal ini didukung oleh berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap aplikasi TikTok. Kemudahan dan kebebasan dalam mencari informasi di TikTok dapat ditemukan melalui fitur pencarian yang ada di TikTok. Pengguna hanya perlu mengetikkan topik yang ingin dicari seperti “*covid 19*” maka dengan mudah konten berisikan tema covid akan muncul, baik bertema edukasi, konspirasi, politik, hiburan daily life dan sebagainya. Dengan adanya fitur ini, masyarakat secara mudah dapat mencari topik yang ingin mereka cari. Selain itu terdapat juga fitur trending hastag dimana pengguna dapat mencari konten-konten tertentu dari hastag yang trending di TikTok.

Serupa dengan kebebasan dalam mencari informasi di TikTok, kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi juga dalam kategori “*bebas*” saja. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kelima narasumber yang mayoritas menjawab “*bebas*”. Poldagri berpendapat bahwa kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi itu sangat bebas sekali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kemudahan akses masyarakat ke TikTok oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya itu, kebebasan yang ada tergantung pada konten itu sendiri, apabila memuat hal sensitive tentunya akan langsung di take down atau ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Salah satu penyebaran yang paling massif dan cepat terjadi adalah melalui media sosial, khususnya baru-baru ini adalah TikTok. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pengguna TikTok yang ada sehingga memungkinkan persebaran informasi terjadi dengan cepat. Fenomena ini didukung adanya fitur FYP yang memungkinkan konten dari negara lain untuk masuk dan dilihat di negara lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap media sosial TikTok, masyarakat tergolong “*bebas*” dalam menyebarkan informasi seperti membuat konten tertentu di TikTok. Hal ini didasari adanya fitur yang memungkinkan masyarakat untuk dapat membuat konten dengan topik apapun tanpa adanya batasan kreatifitas. Pengguna dapat membuat video pendek dengan mengkombinasikan cuplikan video tertentu, tulisan serta musik sehingga konten menjadi lebih menarik untuk dilihat.

3.2.2. Kebebasan dalam Mengekspresikan Diri Melalui Media Apapun

Pengukuran kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok, dilakukan pula wawancara kepada dua pihak yaitu pemerintah yang diwakili Poldagri dan Kepala Sub Koordinator Monitoring Isu serta masyarakat yang diwakili oleh tiga *influencer* politik di TikTok.

1. *Pandangan terkait kebebasan berekspresi*

Pandangan terkait kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan diri di TikTok, baik dari pemerintah maupun *influencer* memberikan jawaban yang cukup bervariasi, namun dapat diambil mayoritas yaitu bebas.

2. *Kebebasan dalam menentukan preferensi di TikTok*

Salah satu indikator untuk mengukur kebebasan berekspresi adalah seberapa bebas masyarakat dalam menentukan preferensinya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga *influencer* politik didapatkan hasil bahwa masyarakat merasa “bebas” dalam menentukan preferensi nya di TikTok.

3. *Faktor Penghambat dalam Kebebasan Berekspresi*

Ada beberapa faktor yang menghambat masyarakat dalam mengekspresikan diri di TikTok. Narasumber anonim berpendapat bahwa hambatan ada pada komentar netizen yang cenderung memberikan komentar beragam sesuka hati. Sementara itu, narasumber Kintan Putri beranggapan bahwa hambatan terdapat pada diri *content creator* itu sendiri yang cenderung overthinking terhadap dampak dari konten yang dibuat, bagaimana respon dari masyarakat, apakah kontennya terlalu ekstrem atau bahkan kurang ekstrem.

4. *Adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi*

Pembatasan kebebasan berekspresi bermakna serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengekang atau membatasi kebebasan berekspresi seseorang. Berdasarkan hasil wawancara, baik pemerintah maupun *influencer* memberikan pernyataan yang berbeda satu sama lain. Narasumber Poldagri beranggapan bahwa pembatasan merupakan hal yang perlu untuk dilakukan, karena sejatinya pembatasan ada bukan untuk mengekang, atau mempersulit seseorang dalam berekspresi namun justru berguna untuk mengendalikan serta mengharmonisasikan. Sementara itu, Kepala Sub Koordinator Monitoring Isuberpendapat bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat atau informasi apapun selama tidak melanggar undang-undang atau regulasi yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa mayoritas masyarakat bersikap kontra kepada pemerintah. Mayoritas masyarakat yang kontra terhadap pemerintah mengindikasikan adanya ketidakpercayaan publik serta kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat (*content creator*) mengekspresikan dirinya atau sikapnya

yang kontra tersebut melalui konten yang dihasilkan. Sikap ini mampu menjadi gambaran bagi khalayak luas untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap suatu isu yang beredar. Apabila masyarakat meresponnya dengan negatif (kontra) maka berarti pandangan masyarakat secara umum adalah negative, namun apabila respon masyarakat positif maka berarti begitulah gambaran pandangan masyarakat luas. Tidak hanya itu, masifnya digitalisasi saat ini membuat masyarakat awam cenderung mengaminkan segala perspektif dan informasi yang mereka dapatkan. Adanya sikap politik masyarakat yang kontra di media sosial TikTok akan turut membuat masyarakat awam untuk mengikutinya dan menerima pandangan tersebut tanpa adanya upaya analisis dan *crosscheck*.

Sikap politik ini sangat penting tidak hanya sebagai cerminan bagi sukses tidaknya kebijakan pemerintah serta bagaimana kemauan yang diminta masyarakat saja, namun juga penting bagi elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Gambaran masyarakat yang negatif akan ikut memberikan gambaran yang buruk juga kepada pemerintah sebagai pihak yang membuat dan mengeluarkan kebijakan tersebut. Sehingga tentu saja pemerintah mengharapkan sikap positif atau dukungan dari masyarakat daripada sikap kontra dari masyarakat.

Meskipun begitu, sebanyak 34% masyarakat cenderung memiliki sikap positif atau mendukung terhadap pemerintah. Hal ini terkait dengan kesuksesan kebijakan yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat mendukung. Selain itu sikap positif ini juga ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah dan turut membantu mengedukasi masyarakat dalam kontennya. Seperti dalam konten mengenai edukasi protocol kesehatan kepada masyarakat serta sosialisasi bahaya virus COVID-19.

Dalam hal kebebasan berekspresi masyarakat tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dari lima narasumber dengan latar belakang dan peran yang berbeda. Kelima narasumber memberikan jawaban bervariasi namun secara umum menyatakan bahwa TikTok adalah *platform* yang memberikan kebebasan yang tergolong tinggi dalam berekspresi.

KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa sikap *content creator* (masyarakat) mayoritas negatif (kontra) kepada pemerintah yang artinya masyarakat cenderung tidak puas dan tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, Kebebasan berekspresi masyarakat di TikTok tergolong cukup tinggi, meskipun kenyataannya seringkali terdapat permasalahan terhadap UU ITE ataupun beberapa kasus take down atau pembatasan ruang berekspresi yang mencuat di masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan narasumber penelitian. Dikarenakan lingkup luas secara nasional pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling dan yaitu *influencer* politik di TikTok. Penulis memiliki kendala dan kesulitan dalam menemukan narasumber yang memenuhi standard an berkemauan untuk terlibat dalam penelitian penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak hal yang dapat dikaji dan diperluas dalam penelitian ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan narasumber

yang lebih banyak untuk bisa memberikan jawaban yang mampu mewakili suara masyarakat dalam meneliti kebebasan berekspresi.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Teguh Ilham, S.STP, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mutia Rahmah, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Serta Ibu Serly Wulandari, S.IP, M.Tr.I.P sebagai Dosen Penguji pada Sidang Ujian Komprehensif Skripsi yang telah turut menyempurnakan skripsi penulis melalui bimbingan serta saran yang membangun. Bapak Helmi Yudha Setia (Kominfo RI) serta Bapak Danang Binuko (Kemendagri) yang telah bersedia membantu saya dalam penelitian sebagai narasumber. Tiga *influencer* politik di TikTok (Anifah Suryani, Kintan Putri, dan anonim) yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian saya, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, A. 2007. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2013. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown, D., dan Hayes, N. 2008. *Influencer Marketing: Who Really Influences Your Customers?* UK: Elsevier Ltd.
- Creswell, J., dan Poth, C. 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: SAGE Publikations Ltd.
- Eriyanto. 2011. Analisis Isi 1st Edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Harahap, N. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Kumar, R. 2011. *Research Methodology: a step-by-step guide for beginners*. London: SAGE Publikation Ltd.
- Notoatmodjo, S. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raihan. 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Roskin, M., Cord, R., Medeiros, J., dan Jones, W. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Satori, D., dan Komariah, A. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Schreier, M. 2012. Qualitative Content Analysis in Practice. London: SAGE Publications.

Schultz, D. P., dan Schultz, S. E. 2005. Theories of Personality (9th Edition). Belmont: CA Whadsworth/Thomson Learning.

Sulisworo, T., Wahyuningsih, D., dan Baegaqi, A. 2012. Demokrasi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Syafiie, I., dan Azhari. 2008. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Tilly, C. 2007. Democracy. New York: Cambridge University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. Evidensi Ilmiah

Arianto, B., 2020. "Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 5, Yogyakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

- Hasibuan, M., 2021. "HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945", Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Irawan., 2018. "Hate speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi", Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Bangka Belitung: IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- La Rue, F. 2010. "Report of the Special Rapporteur On The Promotion And Protection Of The Right To Freedom Of Opinion And Expression". USA: United Nations.
- Ladini, M., 2017. "Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus", Jurnal Sains dan Politik UNNES, Semarang: UNNES.
- Li, Y. dkk., 2021. "Communicating COVID-19 information on TikTok: A content analysis of TikTok videos from official accounts featured in the COVID-19 information", Jurnal Health Education Research, Oxford: Oxford University Press.
- Mafazah, N. 2020. Budaya Politik dan Elite Sikap Politik Pengurus PCNU Pandeglang Banten terhadap Pencalonan Ma'ruf Amin dalam Pilpres Tahun 2019. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahmudah, S. M., dan Rahayu, M., 2020. "Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan", Jurnal Komunikasi Nusantara, Malang: Unitri Press Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Maida, S.T., dan Sarwoko, T.A., 2020. "Konten Politik pada Media Baru dalam Perspektif Komunikasi Ekonomi Politik", Jurnal Penelitian Komunikasi, Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular.
- Marwandianto, dan Nasution, H., 2020. "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP", Jurnal HAM, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nugraha, R. 2019. Analisis Sikap Politik Konstituen Melalui Live Chat Streaming Pada YouTube Dalam Debat Pemilihan Presiden 2019. Jatinangor: IPDN.
- Nurlatifah, M., 2016. "Ancaman Kebebasan Berekspreasi di Media Sosial". Yogyakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Sakti, Y., 2009. "Perbedaan Political Efficacy pada peran gender maskulin, feminim, androgini, dan undifferentiated". Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Schmidbauer, H., Rösch, A., dan Stieler, F., 2017. "The 2016 US Presidential Election and Media on Instagram: Who was in the lead?", Journal Computers in Human Behaviour, Amsterdam: Elsevier Ltd.
- Wijaya, A. 2019. Perilaku Politik Masyarakat Desa Gelangsar dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Yamamoto, M., Kushin, M. J., & Dalisay, F. 2015. "Social Media And Mobiles As Political Mobilization Forces For Young Adults: Examining The Moderating Role Of

Online Political Expression In Political Participation." *Journal New Media and Society* 17(6), California: SAGE Publikations.

Yousefinaghania, S., dkk., 2021. "An analysis of COVID-19 vaccine sentiments and opinions on Twitter", *International Journal of Infectious Diseases*, Amsterdam: Elsevier Ltd.

Zhu, A., Chan, A., dan Chou, K., 2019. "Creative Social Media Use And Political Participation In Young", *Journal of Adolescence*, Amsterdam: Elsevier Ltd.

D. Sumber Internet

<https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/>. Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia. Kamis, 9 September 2021.

<https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-792142120/welcome-to-indonesia-konten-TikTok-yang-jadi-trending-topik-di-Twitter>. Welcome to Indonesia, Konten TikTok yang Jadi Trending Topik di Twitter. Minggu, 5 September 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201228175255-185-587119/forbes-sebut-TikTok-medsos-pengganggu-paling-inovatif-2020>. Forbes Sebut TikTok Medsos 'Pengganggu', Paling Inovatif 2020. Minggu, 5 September 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210828093800-20-686632/mural-mural-yang-dihapus-dalam-sepekan-terakhir>. Mural-mural yang Dihapus dalam Sepekan Terakhir. Minggu, 5 September 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817100510-12-681391/lbh-jakarta-soal-mural-404-not-found-pemerintah-anti-kritik>. LBH Jakarta soal Mural 404 Not Found: Pemerintah Anti Kritik. Minggu, 5 September 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210816213539-32-681325/senja-mural-jalan-di-tengah-kemunafikan-ruang-politik-ri/2>. Senja Mural Jalan di Tengah Kemunafikan Ruang Politik RI. Senin, 6 September 2021.

<https://hits.zigi.id/viral-di-TikTok-4-lagu-welcome-to-indonesia-berisi-tamparan-1482>. Viral di TikTok, 4 Lagu Welcome to Indonesia Berisi 'Tamparan'. Senin, 6 September 2021.

[https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf). Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. Senin, 6 September 2021.

<https://mediaindonesia.com/opini/387394/TikTok-instrumen-media-sosial-baru-dalam-politik>. TikTok, Instrumen Media Sosial Baru dalam Politik. Minggu, 5 September 2021.

<https://lokadata.id/artikel/indeks-demokrasi-indonesia-merosot-tiga-tahun-terakhir>. Indeks demokrasi Indonesia merosot tiga tahun terakhir. Minggu, 5 September 2021.

<https://kumparan.com/kristianto-naku/kritik-sebagai-alat-uji-berdemokrasi-1vBYdbLfXFn/full>. Kritik sebagai Alat Uji Berdemokrasi. Minggu, 5 September 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peristiwa-mei-1998-titik-nol-reformasi-indonesia>. Sejarah Peristiwa Mei 1998: Titik Nol Reformasi Indonesia. Kamis, 9 September 2021.

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>. Indonesian Digital Report 2021. Minggu, 5 September 2021.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/04/19/14020037/jumlah-pengguna-aktif-bulanan-TikTok-terungkap?page=all>. Jumlah Pengguna Aktif Bulanan TikTok Terungkap. Kamis, 9 September 2021.

<https://www.theindonesianinstitute.com/hate-speech-kebebasan-berpendapat-dan-demokrasi/>. Hate speech, Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi. Senin, 27 September 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan>. Kebebasan Berpendapat Masih Dibatasi, KontraS Nilai Jokowi Masih Alergi Kritikan. Minggu, 19 September 2021.

<https://wearesocial.com/digital-2020>. Digital In 2020. Minggu, 19 September 2021.

<https://wearesocial.com/digital-2021>. Digital In 2021. Jumat, 10 September 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=XdjWwLRvzrw>. Anak TikTok Ngeritik, Ada Saja yang Julid. Kamis, 2 September 2021.

